

BUPATI TANA TORAJA KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR: 292 / VII / TAHUN 2025

TENTANG

PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA DALAM E-WALIDATA SIPD RI

BUPATI TANA TORAJA

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 391 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan daerah;
- d. bahwa telah dilakukan pemeriksaan data statistik sektoral berbasis elektronik pada *E-Walidata* SIPD RI;
- e. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa, hurufb, hurufc, dan hurufd, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Tana Toraja dalam E-Walidata SIPD RI.

of

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1447);

- Memperhatikan: 1. Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Dalam Negeri 👃 Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 hal Implementasi SIPD;
 - 2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3.4/11781/Bangda tanggal 13 November 2023 hal Pengimputan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menyebarluaskan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat

Kabupaten Tana Toraja Dalam *E-Walidata* SIPD RI dengan daftar data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan bupati

ini.

KEDUA : Berdasarkan hasil pemeriksaan data statistik sektoral

daerah Tana Toraja telah memenuhi ketentuan prinsip-

prinsip Satu Data Indonesia.

KETIGA : Data statistik sektoral tingkat kabupaten Tana Toraja

digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan kabupaten Tana

Toraja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale pada tanggal

M

TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah sekabupaten Tana Toraja

2. Admin Walidata Perangkat Daerah sekabupaten Tana Toraja

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR
TENTANG
PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK
SEKTORAL DAERAH TINGKAT KABUPATEN
TANA TORAJA DALAM *E-WALIDATA* SIPD RI

DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA DALAM *E-WALIDATA* SIPD RI

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2023
1	1.01.000001	Asrama sekolah	Unit	jumlah asrama sekolah yang tersedia	0
2	1.01.000002	Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	jumlah asrama sekolah yang perlu direhabilitasi	0
3	1.01.000003	Asrama sekolah yang layak	Unit	jumlah asrama sekolah yang dinilai layak	0
4	1.01.000004	Asrama sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah keseluruhan asrama sekolah yang rusak sedang/berat	0
5	1.01.000005	Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen	Jumlah Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	2
6	1.01.000007	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi	Bahasa	jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi	2
7	1.01.000008	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi	Bahasa	jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi	1
8	1.01.000009	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya	Bahasa	jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya	1
9	1.01.000013	Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	jumlah keseluruhan bangunan gedung paud yang memerlukan pemeliharaan	218

				Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
4797	8.01.000088	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kegiatan	Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan pelaksanaan Tugas paskibraka Tahun Sebelumnya	1
4798	8.01.000089	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Kinerja Capaian Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	6
4799	8.01.000091	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialiasis, Bimtek, Kursus, dan/atau Pelatihan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100
4800	8.01.000093	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Tahun Sebelumnya)	6
4801	8.01.000094	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tahun Sebelumnya)	1
4802	8.01.000104	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Laporan Pelaksanaan & Dokumen SK Anggota Forkopimda)	1
4803	X.XX.00001 0	Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1. Definsi: Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam	

Forum Satu Data pada tahap perencanaan pengumpulan Data SSD. 2. Kriteria: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dimaksud adalah DSSD yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Walidata Pendukung lingkup Perangkat Daerah . 3. Cara Pelaksanaan: Pelaksanaan pengumpulan DSSD menggunakan aplikasi e-walidata dalam SIPD dan aplikasi pendukung lain yang ditentukan. 4. Jenis Data: Data SSD mencakup Data Regsosek, vaitu data seluruh penduduk yang mencakup kondisi sosial ekonomi dan memiliki peringkat kesejahteraan. Tahapan Pengumpulan Data Regsosek dalam Pemutakhiran Regsosek, yaitu proses pembaharuan Data Regsosek yang ditujukan untuk menjaga keakuratan dan validitas Data Regsosek. 5. Cara Pelaksanaan Regsosek: Koordinasi dan Pemutakhiran Pelatihan/Refreshment, Sosialisasi, Desa (Pertemuan Musyawarah Ketua Konsultasi Publik, Forum Satgas/SLS, Penetapan Data), Pemutakhiran (Otomasi, Mandiri dan Penjangkauan Aktif), Verifikasi-Validasi, Monitoring di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kab/Kota.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG